

Penguatan Kapasitas Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Melalui pemahaman dasar analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan

Kamis, 24 Februari 2022

Outline

- **Pentingnya peran pemerintah daerah** dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem
- **Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah** dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem
- **Bagaimana pemerintah daerah dapat menguatkan kapasitas internal** dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem?

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0% pada 2024

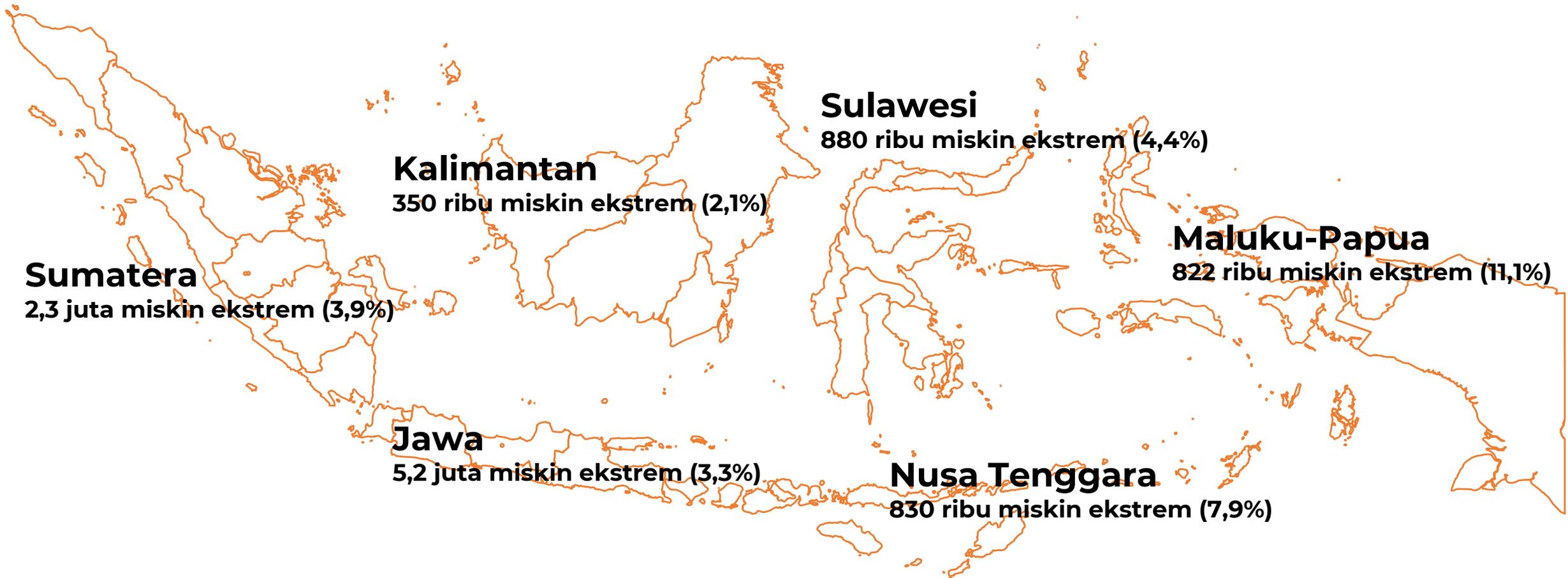
Angka kemiskinan	Periode 2015—2019	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Miskin	11,3%—9,4%	9,8%	10,1%
Miskin ekstrem	7,2%—3,7%	3,8%	4,0%

- Selama periode 2015-2019, angka kemiskinan ekstrem mengalami tren penurunan
- Jumlah penduduk miskin ekstrem bertambah ± 400 ribu orang per tahunnya selama 2 tahun terakhir. Untuk mencapai target 0% pada 2024, diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar $\pm 3,6$ juta per tahun

Perlu penyesuaian & modifikasi program dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem

- Target 0% kemiskinan ekstrem pada 2024
- Masyarakat miskin ekstrem tidak hanya miskin secara ekonomi, namun sumber daya di dalam rumah tangga-nya juga terbatas
 - 15% rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas dua kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin
 - Masih ada sekitar 10% penduduk miskin ekstrem usia 17 tahun ke atas yang tidak memiliki KTP dan hampir 1/3 anak usia di bawah 18 tahun di kelompok miskin ekstrem tidak memiliki akta kelahiran
 - 21% rumah tang miskin ekstrem memiliki rumah tangga usia 65+ tahun dan 18% rumah tangga miskin ekstrem berkepala rumah tangga perempuan
- Penduduk miskin ekstrem tersebar di seluruh wilayah

Kemiskinan ekstrem tertinggi di Maluku-Papua dan NT, namun terbanyak di Jawa & Sumatera





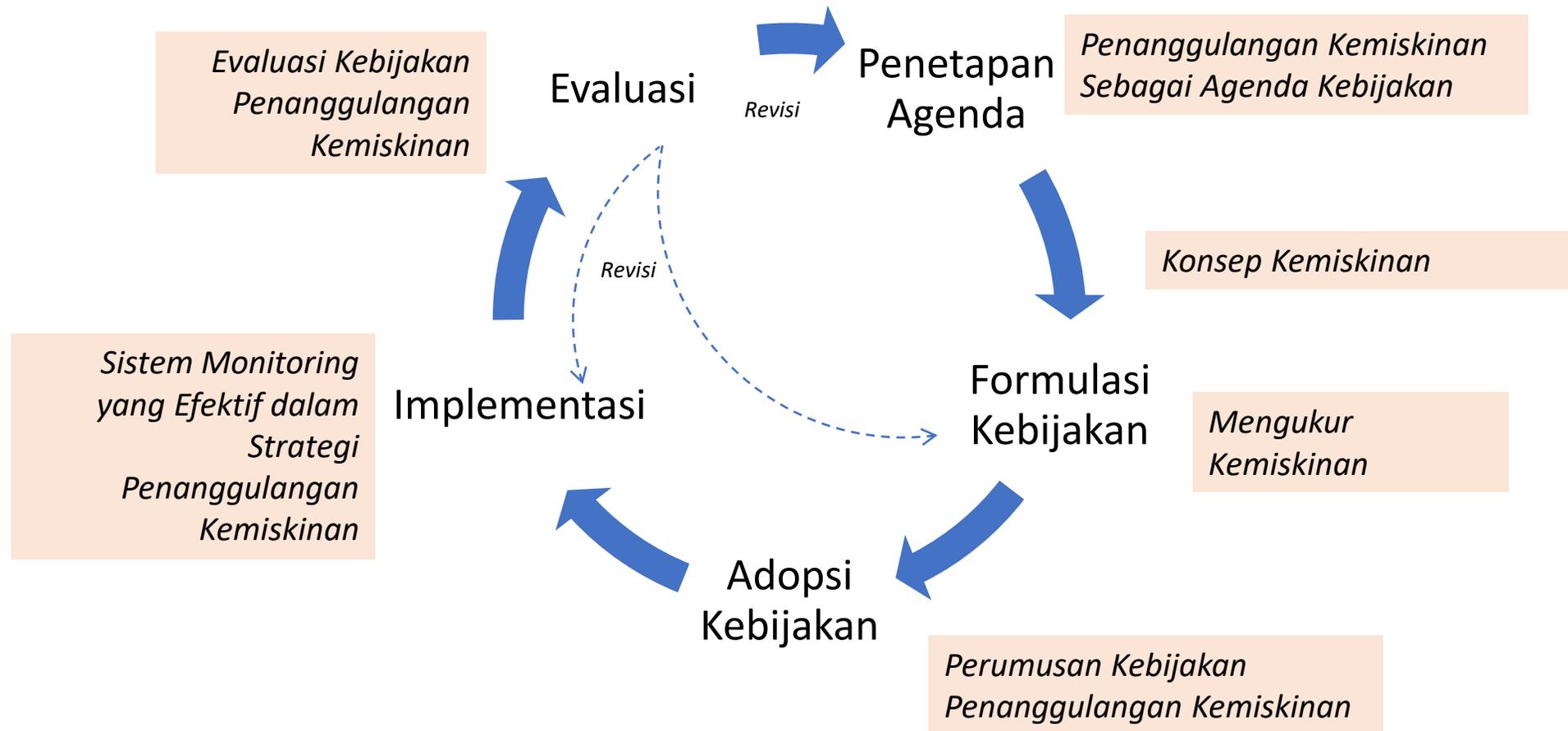
Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem

Program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berjalan saat ini belum tepat sasaran

- Pendataan/pemutakhiran DTKS di daerah masih belum dapat memastikan penduduk miskin ekstrem terdata secara tepat
- Kepemilikan dokumen legal kependudukan (KTP/akta kelahiran) belum menjangkau seluruh masyarakat miskin ekstrem
- Ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi masih terbatas
- Minimnya dukungan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal:
 - Melakukan pembaruan dan memahami data untuk mengetahui permasalahan kemiskinan ekstrem, penyebab, serta rekomendasi program penanggulangannya
 - Merancang program
 - Menentukan wilayah lokus program
 - Mengintegrasikan program lintas sektor/pemangku kepentingan

Bagaimana pemerintah daerah dapat menguatkan kapasitas internal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem?

Memahami konteks, konsep, dan teknik dasar analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan



Memahami konteks, konsep, dan teknik dasar analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan

1. Kemiskinan Sebagai Agenda Kebijakan

Urgensi kemiskinan

Kebijakan kemiskinan dari masa ke masa

2. Konsep Kemiskinan

Perkembangan konsep kemiskinan

Ragam konsep dan dimensi kemiskinan

3. Mengukur Kemiskinan

Ragam pendekatan pengukuran kemiskinan

Data dan analisis kemiskinan

4. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Jenis kebijakan penanggulangan kemiskinan

Ragam kerangka kerja perumusan kebijakan

5. Monitoring Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Konsep pelaksanaan monitoring

Sistem monitoring penanggulangan kemiskinan

6. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Konsep pelaksanaan evaluasi

Sistem evaluasi penanggulangan kemiskinan

Terima Kasih



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id

 @SMERUInstitute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute